

**PERKEMBANGAN ORGANISASI PERSATUAN ISTRI PRAJURIT
(PERSIT) KARTIKA CHANDRA KIRANA PAYAKUMBUH
PADA MASA ORDE BARU**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Jurusan Sejarah FIS UNP Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-1)*



Oleh:

Widya Angrayni Saputri

42821/2003

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**Perkembangan Organisasi Istri Prajurit
(Persit) Kartika Chandra Kirana Payakumbuh Pada Masa Orde Baru**

Nama : Widya Anggrayni Saputri
BP/NIM : 2003/42821
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2011

Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 196102181984032001

Pembimbing II,



Drs. Etmi Hardi, M.Hum
NIP. 196703041993031003

Ketua Jurusan,



Hendra Naldi, S.S, M.Hum
NIP. 196909301996031001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS

UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan *lulus* setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Tanggal 11 Agustus 2011

PERKEMBANGAN ORGANISASI PERSATUAN ISTRI PRAJURIT (PERSIT) KARTIKA CHANDRA KIRANA PAYAKUMBUH PADA MASA ORDE BARU

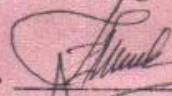
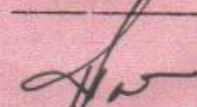
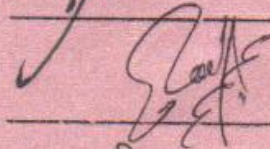
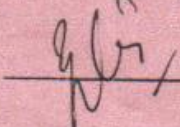
Nama : Widya Anggrayni Saputri
BP/NIM : 2003/42321
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2011

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
2. Sekretaris : Drs. Etmi Hardi, M.Hum
3. Anggota : 1. Hendra Naldi, S.S, M.Hum
2. Abdul Salam, S.Ag, M.Hum
3. Drs. Gusraredi

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Alhamdulillahillahi Rabbil Alamin . .
Hari ini secuil kemenangan sudah ku raih
Secercah harapan telah ku tempuh
Kutelah dapat menggapai setetes harapan yang terpendam
Yang telah kurajut diantara suka dan duka dengan sejuta harap
Ku bangun dengan bingkai keyakinan walau penuh halangan dan rintangan
Walau ini bukan merupakan awal atau akhir perjalanan
Hanya Engkau yang tau

Sebuah masa telah kulalui dengan penuh warna
Meski dalam suatu kisah yang panjang
Penuh liku ujian cobaan dan hempasan
Namun jiwa ini yang telah penuh dengan kasih sayang
Akhirnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan
Puji syukur ku ucapkan kehadiran Mu . .

Seiring dengan bergulirnya waktu kehidupan
Sererentetan kisah masih dijalani, harapan sangat besar
Aku menyadari atas kesepakatanmu yang Engkau anugerahkan
Hingga detik kebahagiaan ini datang
Hanya karena Ridho Mu ya Allah

Rabb..
Ajari aku tuk bisa menerima kenyataan dengan sabar
bahwa tak semua kenyataan itu indah impian
Karena hidup adalah sebuah misteri
Dan hanya Engkau yang Maha Tahu
Apa rahasia dibalik semua kejadian dengan Ridho dan Cinta Mu. .

Dari pelataran hati yang paling terdalam
Ku torehkan secuil rasa dari sekepal yang kupunya
Dengan bahasa ku sampaikan rasa
Dengan jemari ku tarikan kata
Dengan segenap ketulusan,
Kupersembahkan Dengan hati yang tulus karya kecil ku ini
Mengharumkan sepasang nama yang tertulis di jiwaku
untuk yang Tercinta Ayahanda Sucipto dan Ibunda Suasri

Ingin ku hapuskan keringatmu yang tercucur
Ingin ku bagi rasa bahagiaku bersama
Inginku ungkapkan rasa terimakasihku untukmu
Sekarang hanya berupa ilmu dan sebuah karya ini kupersembahkan
Untukmu, mudah- mudahan menjadi bermanfaat di akhir kelak
Amin. .

Akhirnya amanat dan harapan besar Ayahanda dan Ibunda bisa ku raih
Secara perlahan harapanmu telah terisi dengan simbol keserjaan
Ku akan selalu ingat pesan Ayah dan Ibu
Untuk selalu menjadikan ku yang terbaik. .

Terimakasih atas segala pengorbanan,
Perhatian, kasih sayang, dorongan, dan nasihat yang telah diberikan
Meski penat, letih, lelah, namun ketegaran dan kesabaranmu
Masih terpatri dari wajahmu
Iswat aura kasih sayang yang mengalir di Tubuhmu saat ini

Semoga naungan restu, desah lelah nafasmu mengarungi waktu,
Dan bisikkan kata yang diiringi deraian air matamu di kesunyian malam
menjadi jembatan emas untuk menggapai angan. .

*Ini adalah impianku,
Segala rasa bangga , haru dariku
Buat semua upaya yang dicurahkan keluargaku
Kini berubah menjadi asa yang kugenggam sepanjang hayat
Ini adalah perjalananku. .*

*Thankz To Adek ku tersayang, dua bodyguard ku ☺
Bripda Agung Ramadhona dan Arief Trihandoko
Buat Agung . . Selamat akhirnya cita- citamu tercapai juga
Kita semua salut dengan kegigihanmu
Mega mba ' n arief juga bisa mengharumkan nama keluarga sama sepertimu
Buat Arief adinda ku yg paling bontot . . calon Pak guru ne. .
semua sudah ada jalannya masing- masing
Tetap semangat ea nda ' n tetap PeDe
Guru pahlawan tanpa tanda jasa loh . . so kita ga ' boleh minder
rajin- rajin kuliah . . jangan kaya ' Kanda mu . . hehe
Mega kita Bertiga bisa jadi penebus duka sara kedua Orang Tua kita
Tak lupa Kubentangkan untaian terimakasih kepada Sanak Saudaraku
Untuk semua keluarga besar Ayahanda ku
dan keluarga besar Bundaku
Makasih atas segala doa, pengorbanan dan kasih sayang
Yang telah diberikan
semoga Allah memberikan Rahmat kepada kita semua
hingga kita dapat mewujudkan harapan yang kita impikan
Amin . .*

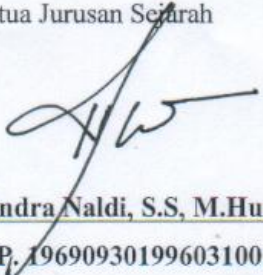
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Anggrayni Saputri
Nim /BP : 42821/2003
Prodi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya dan pemikiran saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi yang saya buat ini merupakan hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Sejarah


Hendra Naldi, S.S, M.Hum
NIP. 196909301996031001

Padang, Agustus 2011

Pembuat Pernyataan,




Widya Anggrayni Saputri

ABSTRAK

Widya Angrayni. S: 2003/42821 “Perkembangan Organisasi Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Payakumbuh pada Masa Orde Baru”. Skripsi Program Studi Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana Payakumbuh pada Masa Orde Baru. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana perkembangan Organisasi persit kartika Chandra Kirana Payakumbuh pada Masa Orde Baru. Dengan menggunakan ideologi ibuisme, negara menetapkan peran perempuan dalam kehidupan keluarga yang lebih banyak dikonotasikan sebagai "Ibu". Untuk menyebarkan ideologi itu, pada masa Orde Baru negara memanfaatkan aparatnya diantaranya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena sifat kepemimpinan yang hierarkis, maka TNI menciptakan subordinat melalui organisasi istri yang selanjutnya perempuan/istri prajurit menjadi subordinat dari organisasi istri.

Penelitian ini termasuk penelitian sejarah dengan metode penelitian sebagai berikut (1) Tahap pertama adalah heuristik, yaitu mencari data dari sumber yang dianggap relevan yaitu dari pihak pengurus dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 60 KODIM 0306 Koorcabrem 032 PD I /Bukit Barisan Payakumbuh. Penelitian ini juga memakai metode sejarah lisan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa pelaku-pelaku sejarah itu telah mengalami sendiri apa yang dilakukannya, yaitu melalui wawancara, (2) kritik sumber, baik ekstern maupun intern, (3) analisa dan interpretasi, yaitu usaha untuk menghubungkan dan menganalisa fakta, (4) tahapan penulisan, yaitu mendeskripsikan perkembangan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana Payakumbuh Pada Masa Orde baru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi Persit Kartika Chandra Kirana Payakumbuh pada Masa Orde Baru, (1) banyak mengarah pada kegiatan domestik dan merupakan pendukung bagi karier suami, (2) istri berkewajiban menjaga kondisi fisik suami sebagai prajurit, (3) konsekuensi penempatan perempuan dalam struktur institusi militer menyebabkan istri berkewajiban mengutamakan rumah tangga sehingga terbatas peluang untuk mengaktualisasi diri, (4) negara dan TNI-AD memperoleh keuntungan ganda dari para istri prajurit berupa dukungan moral dan materiil, (5) dalam perjalanan sejarahnya perkembangan politik negaralah yang mempengaruhi perkembangan organisasi Persit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr, Wb

Alhamdulillah dan puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *Perkembangan Organisasi Persit kartika Chandra Kirana Payakumbuh pada Masa Orde Baru*. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Berbagai bantuan moral maupun material banyak penulis terima dari berbagai pihak dalam melaksanakan penelitian maupun penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya terutama penulis ucapkan pada Ibu Dr. Siti fatimah, M.Pd,M.Hum selaku pembimbing I, dan Bapak Drs, Etmi Hardi, M. Hum selaku pembimbing II yang penuh kesungguhan memberikan bimbingan dan dorongan yang berarti selama penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Hendra Naldi,SS.M.Hum, Bapak Drs. Gusraredi dan Bapak Abdul Salam,Sag, M.Hum sebagai Dosen tim penguji.

3. Bapak-bapak dan Ibu staf pengajar jurusan sejarah serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu di kampus ini.
4. Kepada kedua orang tuaku dan adik-adikku yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
5. Kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penuliskan satu persatu.

Mudah-mudahan amal kebaikan yang telah diberikan, dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua, amin.

Padang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	17
BAB II Sekilas Tentang Sejarah Persit	
A. Sejarah Berdirinya Persit KCK di Indonesia	20
a. Masa Pertumbuhan.....	20
b. Organisasi Mandiri.....	24
c. Organisasi Semi Dinas.....	29
B. Lahirnya Persit KCK Payakumbuh.....	33
1. Struktur organisasi.....	36
2. Kegiatan.....	40

BAB III Persit KCK Payakumbuh dalam bayang- Bayang Orde Baru

- A. Hierarki sebagai alat Kontrol kegiatan Persit KCK Payakumbuh ...44
- B. Timbulnya Nuansa Feodal di dalam Organisasi54
- C. Berkembangnya motto asah, asih, dan asuh58
- D. Persit Payakumbuh Pasca Jatuhnya Orde Baru.....61

BAB V KESIMPULAN..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah telah membuktikan bahwa perempuan pernah memiliki posisi sosial yang setara dengan laki-laki. Pada zaman komunal primitif, perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan, dan kemampuan yang sama dalam memproduksi makanan utama demi kelangsungan hidup komunitas, sebelum akhirnya muncul kepemilikan pribadi akibat kelimpahan yang dikuasai laki-laki. Kepemilikan ini kemudian menyingkirkan perempuan, dan menjadikannya sebagai salah satu “objek” lambang kemakmuran, dan kekayaan yang dipertukarkan hingga menjadi budaya yang diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat yang dibedakan berdasarkan kelas. Kondisi inipun terus berlanjut hingga saat ini.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan warganya. Demikian halnya perempuan sebagai warga negara dan sumber daya manusia, tidak terlepas dengan kebijakan negara yang secara tidak langsung mempengaruhi kedudukan sosialnya, melalui kegiatan ekonomi, politik, dan hukum, bahkan ada kebijakan tertentu yang memperlihatkan besarnya kontrol atas kehidupan perempuan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, sasaran utama ideologi negara adalah organisasi bentukan pemerintah, seperti Dharma Pertiwi (organisasi

istri angkatan bersenjata)¹, Dharma Wanita (organisasi istri PNS), dan Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK). Organisasi–organisasi wanita independen yang pernah tumbuh, demikian juga suara–suara perorangan yang menyuarkan kepentingan perempuan seolah–olah hilang ditelan bumi di bawah bayang–bayang rezim Orde Baru. Pemerintahan Soeharto memberikan pencitraan terhadap perempuan sebagai kaum ibu semata yang berada di samping, bahkan dibelakang laki– laki. Pencitraan ini tampak pada organisasi bentukan pemerintah tersebut.

Ideologi yang dihembuskan tentang peranan perempuan pada masa Orde Baru adalah menjadi pendamping suami yang setia, berguna bagi bangsa, pendidik anak, pengelola rumah tangga, dan anggota masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Kartowiyono, ideologi pada masa Orde Baru menyatakan bahwa fungsi perempuan sebagai kelompok sosial lebih diutamakan untuk kepentingan peran domestiknya².

Tugas perempuan sebagai anggota masyarakat di letakkan pada prioritas yang terakhir, oleh karena itu program dan kebijakan pemerintah merujuk pada peran domestik dengan menciptakan gerakan perempuan di Indonesia yang non–politis. Melalui organisasi Dharma Pertiwi, Dharma Wanita, dan Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), pemerintah

¹ Diantaranya: Organisasi Persit (Persatuan Istri Prajurit) TNI AD didirikan pada tanggal 3 April 1946, Yalasenatri didirikan pada tanggal 27 Agustus 1957 sebagai kelanjutan dari organisasi – organisasi istri Angkatan Laut yang sudah ada sejak tahun 1946, Pia Ardhya Garini(Persatuan Istri Angkatan Udara) didirikan tanggal 25 November 1956, Bhayangkari (Persatuan Istri Anggota Polri) didirikan tanggal 17 Agustus 1949. Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 230–23.

² Suyatin kartowiyono, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1977), hal. 59.

mengontrol perempuan Indonesia di semua lapisan masyarakat dan menguatkan subordinasi perempuan.

Negara memanfaatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mempunyai sifat kepemimpinan yang hierarkis, maka TNI menciptakan subordinat melalui organisasi istri, yaitu Persit yang selanjutnya perempuan/ istri prajurit menjadi subordinat dari organisasi istri ini. Persit Kartika Chandra Kirana (KCK)³ sebagai wadah istri prajurit TNI-AD sejak kongres darurat Persit 1964, menyatakan kebulatan tekadnya bahwa Persit merupakan bagian yang mutlak dan tidak terpisahkan dari TNI-AD, selain itu tekad dipertegas dengan pengarahan dari salah satu mantan pimpinan TNI-AD, almarhum Letnan Jenderal A. Yani yang menyatakan “karena ada TNI-AD ada Persit, dan sebaliknya kalau tidak ada TNI-AD tidak ada Persit”⁴.

Munculnya doktrin “Dwifungsi ABRI” pada masa Orde Baru, mengakibatkan TNI menjadi alat penguasa/pemerintah. ABRI yang di masukkan sebagai golongan fungsional, masuk menjadi anggota Golkar, maka secara otomatis anggota Dharma Pertiwi menjadi anggota Golkar, dalam hal ini secara sistematis TNI memanfaatkan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana. Persit digunakan untuk melakukan berbagai fungsi yang esensial untuk kelancaran mekanisme aparat militer/birokrasi demi menyempurnakan, dan lebih mengefektifkan pelaksanaan Dwifungsi ABRI tersebut.

³ Selanjutnya disingkat Persit KCK.

⁴ Majalah Kartika Kencana edisi 57/1999, hal. 31.

Kebijakan–kebijakan yang ada pada masa Orba sangat mempengaruhi perkembangan organisasi Persit KCK, baik di tingkat pusat maupun di tingkat bawah, yaitu sampai dengan tingkat ranting. Salah satu cabang organisasi Persit KCK terdapat di Payakumbuh, berdiri pada tanggal 10 Februari 1959, yang berpusat di Kodim (Komando distrik militer) 0306 cabang 60 (Enam Puluh) Koorcabrem 032 PD I/Bukit Barisan Payakumbuh. Sejak memasuki periode pemerintahan Orde Baru, Persit Payakumbuh mengalami perkembangan yang penting, yaitu adanya ketetapan yang menyatakan bahwa organisasi Persit semi–dinas⁵. Penetapan ini bermaksud untuk mengintegrasikan kegiatan organisasi istri dengan kebijakan TNI–AD dalam melaksanakan Dwifungsi ABRI dan berpartisipasi dalam kegiatan ABRI Masuk Desa (AMD). Dengan adanya kebijakan tersebut kegiatan organisasi Persit Payakumbuh banyak didukung oleh instansi baik materil dan moril.

Bergabungnya Persit KCK dengan Dharma Pertiwi pada masa Orde Baru menyebabkan organisasi istri yang berada di daerah, seperti Persit KCK Payakumbuh hampir tidak memiliki otonomi. Adanya kebijakan dan program kegiatan yang diatur dengan cara *top down* (berorientasi pada kebijakan dari atas), menyebabkan Persit Payakumbuh menjadi terpasung dan sulit untuk mewujudkan organisasi yang memiliki otonom. Sistem *top down* juga membuat organisasi Persit Payakumbuh sulit berkembang karena anggotanya mengalami pembatasan ruang gerak.

⁵ Soebijono, *Dwifungsi ABRI Perkembangan dan Perannya dalam Kehidupan Politik Indonesia* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1997), hal. 95.

Selain itu Persit Payakumbuh digunakan sebagai salah satu alat penting untuk mengumpulkan suara bagi Golkar dalam pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat ketika Golkar keluar sebagai pemenang pemilu dan Soeharto terpilih kembali sebagai presiden RI. Ketika Pemilu tahun 1971 berlangsung seluruh anggota Persit Payakumbuh diwajibkan untuk memilih partai Golkar, ini ditujukan untuk mengontrol massa agar tetap berada di jalur Golkar. Kebijakan lainnya yaitu program KB yang harus dilaksanakan oleh anggota Persit Payakumbuh. Mau tidak mau mereka harus ikut KB karena yang di dalam daftar gaji hanya untuk dua orang anak yang mendapat tunjangan. Tunjangan untuk anak sangat mereka butuhkan karena takut mengalami kesulitan ekonomi apabila hanya mengandalkan gaji pokok⁶.

Pasca kejatuhan Orba, perkembangan Persit KCK tetap terhambat oleh gerakan patriarki yang telah mengakar selama 32 tahun. Meskipun Orde Baru telah runtuh, dan berganti dengan semangat Reformasi yang diharapkan membawa demokrasi, tetapi pergantian rezim bukan berarti terjadi pergantian ideologi. TNI- AD di era Reformasi, dimana sudah tidak ada lagi Dwi Fungsi ABRI dan peran ganda, TNI tetap mewarisi “tradisi” Orde Baru yang terlihat kurang berkualitas.

Sampai pada saat ini, kegiatan organisasi Persit di Payakumbuh di bidang kemasyarakatan selalu mengacu pada kebijakan pimpinan TNI- AD, sehingga perkembangannya bergantung pada kemampuan ketua

⁶ Wawancara dengan Sri, anggota Persit Kartika Chandra Kirana Payakumbuh, tanggal 6 Juli 2011.

dalam mengimplementasikan kebijakan institusi TNI-AD, hal ini mengakibatkan revitalisasi Persit belum terlihat dengan jelas, apakah mereka berkeinginan untuk berubah atau masih mempertahankan kebiasaan lama. Demikian pula kedudukan dan kepengurusannya, disesuaikan dengan jabatan suami yang sering berubah sesuai dengan perubahan dalam lingkungan TNI-AD.

Program kegiatan Persit di Payakumbuh selalu berpedoman pada program kerja yang telah ditetapkan oleh Pengurus pusat, sehingga terasa monoton. Organisasi Persit KCK di Payakumbuh juga melaksanakan kegiatan sosial yang dikoordinir oleh seksi sosial, seperti urusan bantuan sosial dan beasiswa, urusan kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, dan urusan warakawuri, yatim piatu, dan anak cacat, namun kegiatan itu lebih banyak dilakukan ketika organisasi ini akan memperingati hari ulang tahunnya, untuk menunjukkan bahwa organisasi masih memperhatikan kesejahteraan anggotanya.

Dalam kehidupan keluarga dan organisasi militer terdapat pembatasan tertentu dalam mengembangkan pergaulan di lingkungan keluarga militer, yang dianut pula oleh organisasi istri. Ibu Yuliana, mantan anggota Persit KCK tahun 1999, mengungkapkan bahwa kebanyakan istri prajurit dalam mengikuti suatu rapat di organisasi istri Persit Kartika Chandra Kirana tidak berani beradu pendapat dengan pimpinan rapat, mereka takut untuk mengemukakan gagasannya dalam

rapat⁷. Perilaku yang sama tampak pada ketua koordinator cabang (istri komandan Kodim), misalnya yang menjadi peserta rapat kerja daerah, artinya sekalipun menjadi pimpinan di tingkat Koordinator Cabang, anggota tersebut takut untuk mengemukakan gagasan dalam rapat. Ini menunjukkan bahwa hierarki tidak hanya terdapat dalam organisasi tingkat pusat, tetapi terjadi juga di tingkat bawah, yaitu sampai dengan tingkat ranting.

Dampak lainnya yang berimbas pada organisasi Persit KCK akibat dari tradisi dan kebiasaan di kalangan militer pada masa Orba, yaitu terciptanya pembagian kelas antara istri atasan dan istri bawahan. Pada akhirnya harus diakui bahwa kesenjangan sosial antara sesama anggota Persit sering menimbulkan kecemburuan, sehingga perasaan senasib dan sepenanggungan merupakan *lips service* atau omongan belaka. Hal tersebut menunjukkan bahwa Orba sangat mempengaruhi perkembangan organisasi Persit di seluruh tingkatan, tidak terkecuali Persit KCK Payakumbuh. Padahal tradisi lama seperti zaman Orba adalah potret yang kurang menguntungkan bagi pemberdayaan perempuan yang terus menggeliat.

Dengan melihat fenomena tersebut dapat dilihat ketika masa Orde Baru, di dalam organisasi Persit KCK Payakumbuh ada tiga bentuk

⁷ Wawancara dengan Yuliana, mantan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Payakumbuh, tanggal 9 juli 2011.

hubungan, yaitu dominasi, hegemoni, dan kooptasi⁸. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam bagaimana perkembangan organisasi Persit KCK Payakumbuh pada masa Orde Baru.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Berbicara tentang perkembangan sebuah organisasi, banyak masalah yang bisa dimunculkan, namun penulis di sini membatasinya pada perkembangan Persit KCK Payakumbuh pada masa orde Baru dari segi peran dan struktur organisasi.

Oleh karena itu, pembahasan ini dimulai dengan mengambil batasan temporal pada tahun 1966 sampai pada tahun 2010. Tahun 1966 adalah masa pemerintahan Orde baru yang merupakan awal dimulainya masa pendomestikasian gerakan perempuan, dan untuk melihat dinamika perkembangan secara lebih baik, penulis melihat perkembangannya sampai tahun 2010. Sementara batasan spasialnya adalah Persit KCK Payakumbuh, karena salah satu cabang kepengurusannya terdapat di daerah ini yang berpusat di kantor Persit KCK Cabang 60 KODIM 0306 Koorcabrem 032 PD I/Bukit Barisan.

⁸Dominasi dicirikan oleh adanya pihak yang didominasi dan yang mendominasi. Hegemoni adalah hubungan dengan basis intelektual dan etika yang dapat diterima oleh rakyat yang diperintah. Sementara itu, kooptasi merupakan suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi yang merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Heru hendarto, *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1993), hal.10.

Agar lebih terarah dan mendapatkan sasaran yang diinginkan, diajukan pertanyaan sekaligus untuk membatasi kajian ini yaitu: Bagaimana perkembangan organisasi Persit Kartika Chandra Kirana Payakumbuh pada masa Orde Baru

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara garis besar penulisan ini membahas Pengaruh Orde Baru terhadap perkembangan organisasi Persit KCK Payakumbuh. Secara khusus penulisan ini bertujuan untuk melihat pengaruh Orde baru terhadap perkembangan peran dan struktur Persit KCK Payakumbuh, sedangkan manfaat penulisannya adalah penulisan ini diharapkan dapat :

1. Memberikan sumbangan pengetahuan terhadap studi sejarah perempuan,
2. Dapat memberikan cermin bagi pemerintah agar lebih memberi ruang gerak terhadap organisasi perempuan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Kajian tentang sejarah perempuan adalah hal yang sangat menarik karena merupakan suatu fenomena yang menyajikan berbagai macam masalah, dan masa Orba adalah masa yang paling menarik untuk melihat perkembangan gerakan organisasi perempuan. Sejauh ini penelitian maupun penulisan tentang organisasi perempuan pada masa Orde Baru telah pernah dilakukan, seperti Saskia Eleonora Wieringa dalam tesisnya berjudul politisasi *Hubungan Kelamin Indonesia*;

Sejarah gerakan Wanita Indonesia dan Gerwani sampai Orde Baru, Saskia dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa peran organisasi perempuan di masa Orde Baru sangat jauh dari sektor politik dan publik, berbeda dengan masa orde lama yang memberikan leluasa bagi organisasi perempuan dalam dunia politik. Selanjutnya, ada tesis Siti Fatimah *Negara dan Perempuan: Studi kasus Dharma Wanita (1974–1999)*. Penelitian ini mengungkap bagaimana perilaku dan peran Negara dalam mengontrol dan mengakomodir perempuan untuk memperkokoh kepentingan pemerintahan Orde Baru melalui organisasi Dharma Wanita.

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini melihat pula bagaimana dampaknya terhadap perkembangan organisasi Persit KCK, karena pada pemerintahan Orde Baru selain Dharma Wanita dan PKK, Persit KCK yang tergabung dalam Dharma Pertiwi juga disahkan dan didukung oleh pemerintah menjadi organisasi utama untuk keperluan pemerintah.

Ada juga tulisan Tyas Retno Wulan “Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Penguatan Public Sphere di Pedesaan”. Dalam tulisan ini juga membahas organisasi-organisasi perempuan Indonesia pada masa Orde Baru. Tulisan ini mengungkapkan bahwa pada masa Orde Baru organisasi perempuan menjadi organisasi fungsional dan memasuki periode “tidak ada perlawanan” terhadap diskriminasi dan eksploitasi yang dialami kaum

perempuan di Indonesia, dan dapat dikatakan organisasi perempuan bentukan Orba telah mereduksi peran perempuan sebatas tiga I (Istri, Ibu, dan Ibu rumah tangga).

Selain itu ada juga tulisan Rusiyati “Sepintas Gerakan Wanita Indonesia dalam Perkembangan Sejarah”. Tulisan ini membahas tentang perkembangan organisasi perempuan dari tahun 1945–1990. Hal ini sangat menarik karena perkembangan organisasi perempuan di Indonesia dari periode ke periode selalu menyajikan berbagai macam masalah, namun penelitian–penelitian tersebut hanya membahas perkembangan organisasi perempuan secara umum. Penelitian ini berusaha untuk membahas salah satu perkembangan organisasi perempuan secara lebih khusus, yaitu perkembangan organisasi Persit KCK. Oleh sebab itu, penulis menulis tentang “Perkembangan Organisasi Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana Payakumbuh pada Masa Orde baru”

2. Kerangka Konseptual

Persit merupakan organisasi perkumpulan istri prajurit TNI–AD. Organisasi adalah kumpulan sekelompok orang yang memiliki visi dan misi yang sama dan berkumpul dalam suatu wadah yang mempunyai program-program yang bermanfaat untuk anggotanya dan orang lain. Dengan demikian, berorganisasi berarti menghimpun manusia untuk memikirkan secara mendalam permasalahan mereka secara bersama, untuk menyetujui isu–isu bersama, serta menentukan

kesamaan aksi, dan membentuk ideologi. Menurut Suryochondro, organisasi berawal dari gerakan sekelompok orang, yang dikemudian hari berubah menjadi suatu bentuk formal, yaitu kelompok formal yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu⁹. Biasanya organisasi mempunyai peraturan kerja, mempunyai sistem kepemimpinan, dan anggota-anggotanya mempunyai kepentingan yang sama. Organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan wacana gender, termasuk partisipasi politik perempuan. Melalui kegiatan organisasi, kaum perempuan diharapkan dapat menghimpun kesadaran kolektif akan pentingnya perjuangan hak-hak yang selama ini terabaikan.

Organisasi perempuan berawal dari gerakan kaum perempuan yang didorong atas kesadaran perempuan untuk memperbaiki kedudukan, dan nasib perempuan dengan pembelaan dan perjuangan, terbuka dan mempunyai anggota yang bebas, tidak bergantung pada status anggotanya, apakah sudah menikah atau tidak/belum menikah. Program kegiatannya bersifat mandiri dan luas, tidak terkait dengan tugas istri yang harus mengutamakan keluarga dan rumah tangga saja, mempunyai tujuan dan berprinsip dasar pengabdian pada suatu usaha bersama atau cita-cita untuk suatu kepentingan di luar kepentingan di luar kepentingan pribadi¹⁰.

⁹ Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: PT Rajawali, 1984), hal. 5.

¹⁰ Ratna Saptari, *Kerja dan Perubahan Sosial* (Jakarta:Grafiti, 1997), hal. 404

Organisasi istri sedikit berbeda dengan organisasi perempuan umum, khususnya dari anggotanya yang terdiri dari ibu-ibu atau istri-istri anggota TNI-AD yang masih aktif. Kegiatannya juga beda dengan umumnya kegiatan sosial kemasyarakatan, lagi pula dari segi kemampuan pengurus terbatas, terbentur dengan waktu karena keterikatan keluarga. Organisasi istri beranggotakan perempuan yang menjadi istri dari laki-laki yang memiliki profesi tertentu misalnya pegawai negeri sipil (PNS), militer, atau laki-laki yang memiliki keahlian tertentu: dokter, insinyur. Khususnya bagi organisasi istri PNS dan militer, sifat keanggotaannya otomatis sesuai dengan profesi suaminya. Program kegiatannya bersifat eksklusif sehingga tidak memperjuangkan perbaikan kondisi perempuan pada umumnya. Selain itu, dalam organisasi istri susunan pengurus sangat bergantung pada jabatan suaminya sehingga struktur organisasi bersifat hierarkis. Kartowiyono menyatakan bahwa perkumpulan istri pegawai terdiri dari istri yang secara otomatis (secara pasif) menjadi anggota perkumpulan¹¹. Hal itu mudah dilakukan sebab istri orang Indonesia termasuk istri tradisional, yang sejak berabad-abad mendapat ajaran supaya berbakti kepada suami.

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Menurut Handoko, struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-

¹¹ Suyatin Kartowiyono, *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: (Yayasan Idayu, 1997), hal. 24.

mekanisme formal dengan nama organisasi dikelola¹². Struktur organisasi menunjukkan kerangka, dan susunan perwujudan pola tetap hubungan–hubungan diantara fungsi–fungsi, bagian-bagian atau posisi–posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Organisasi adalah suatu susunan atau kerangka yang menunjukkan segenap fungsi yang ada dalam organisasi, hubungan fungsi-fungsi tersebut serta wewenang dan tanggung jawabnya agar tujuan itu tercapai, maka diperlukan kerjasama yang telah terpadu antara atasan dan bawahan maupun bawahan dengan bawahan, dengan penerapan sistem organisasi yang baik akan memudahkan terciptanya tim yang kompak. Struktur organisasi adalah susunan dengan beberapa orang yang masuk dalam organisasi tersebut. Struktur tersebut dibuat berdasarkan pentingnya tanggung jawab dan kewenangan dalam tiap individu tersebut dalam organisasi tersebut¹³.

Organisasi perempuan bentukan Orba telah mereduksi peran perempuan sebatas tiga I (Istri, Ibu, dan Ibu rumah tangga). Tugas ini amat mulia, tetapi tanpa disadari telah menyebabkan tidak adanya tempat bagi perempuan sebagai “manusia merdeka yang dapat mengekspresikan pikirannya bagi kemajuan kaum perempuan dari sudut kepentingan perempuan”. Keadaan ini membuat berbagai

¹² Handoko, *Perilaku Organisasi Buku 2*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hal. 214.

¹³ *ibid*, hal. 215

persoalan kekerasan, dan ketidakadilan yang menimpa perempuan di masyarakat, atau di luar lingkup keluarga praktis diabaikan. Sebaliknya, organisasi perempuan pada saat itu memainkan peran subordinasi dan menyebarluaskan citra peran ideal perempuan dalam konteks tiga I tersebut.

Menurut Koizer, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem¹⁴. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil, dan menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu bekerja, baik secara organisasi dan organis.

Dengan adanya peran, ada yang dirugikan dan diuntungkan, karena peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar, dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial

¹⁴ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi* (Universitas Gajah Mada: Yogyakarta, 1998). Hal. 21.

tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Hegemoni tidak saja terjadi antara negara namun dapat juga terjadi antara kelompok di dalam suatu negara. Negara sama artinya dengan *staat* dalam bahasa Jerman, *state* dalam bahasa Inggris yang mempunyai dua arti, yaitu (1) masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis : (2) lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis,¹⁵ dengan demikian ia yang menata dan menguasai wilayah tersebut namun, dalam penggunaan bahasa sehari-hari, istilah “negara” sering digunakan untuk menjelaskan “pemerintahan” dan sebaliknya. “Negara” dan “Pemerintahan” adalah dua kata yang berbeda, tetapi sering digunakan untuk saling menggantikan. Negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijaksanaan dalam pelaksanaan sanksi hukumnya, sedangkan pemerintah hanya sekedar agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyarakat politik.

Negara dan masyarakat selalu berintegrasi. Negara mengeluarkan kebijakan dan peraturan. Agar peraturan itu dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat, negara menggunakan dua cara, yaitu pertama dengan dominasi atau paksaan/koersif, dan kedua melalui kepemimpinan moral dan intelektual. Dalam membangun

¹⁵ *ibid*, hal. 26.

simbol negara masyarakat diintegrasikan ke dalam organisasi negara yang dicetuskan sebagai persatuan nasional¹⁶.

Kepemimpinan moral dan intelektual oleh Gramsci disebut Teori Hegemoni¹⁷. Menurut faktor terpenting sebagai pendorong terjadinya hegemoni adalah faktor ideologi dan politik yang diciptakan penguasa dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membentuk pola pikir masyarakat. Faktor lainnya adalah *pertama* paksaan yang dialami masyarakat, sanksi yang diterapkan penguasa, hukuman yang menakutkan, *kedua* kebiasaan masyarakat dalam mengikuti suatu hal yang baru dan ketiga kesadaran dan persetujuan dengan unsur-unsur dalam masyarakat.

Faktor kebijaksanaan pemerintah dianggap wajib untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai warga negara yang baik, sehingga anggota Pesit melaksanakan program KB, di samping untuk mengatur kelahiran juga melaksanakan bakti kepada negara dengan melaksanakan kebijaksanaan untuk mencapai kesuksesan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan prinsip metodologi penelitian sejarah, dimana dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik,

¹⁶ Michael van Langenber, *Bahasa dan Kekuasaan, Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. (Mizan Pustaka: Bandung, 1996) hal 223

¹⁷ www.wikipedia.com, diakses tanggal 10 Juli 2011

interpretasi, dan penulisan¹⁸. Tahap pertama adalah heuristik, yaitu mencari data dari sumber yang dianggap relevan yaitu dari pihak pengurus dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 60 KODIM 0306 Koorcabrem 032 PD I /Bukit Barisan Payakumbuh. Untuk mempertajam pemahaman tentang kajian ini dilakukan melalui studi kepustakaan antara lain Pustaka Fakultas Ilmu sosial Dan Politik Universitas Negeri Padang, Pustaka Universitas Negeri Padang, dan Arsip Persit Payakumbuh.

Penelitian ini juga memakai metode sejarah lisan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa pelaku-pelaku sejarah itu telah mengalami sendiri apa yang dilakukannya. Sejarah lisan berguna untuk mendukung data-data primer. Untuk metode ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti pimpinan Persit Kartika Chandra Kirana cabang 60 Payakumbuh, pembantu pimpinan yang terdiri dari ketua seksi bidang dan anggota pengurus, juga dengan mantan anggota Persit. Tempat wawancara akan ditentukan pada saat kontak dengan informan. Informan yang menentukan kapan bisa berkesempatan. Fokus wawancara adalah sekitar kegiatan persit pada masa Orde baru dan Reformasi.

¹⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, , 1996), hal. 34.

Prosedur wawancara sangat ditentukan oleh situasi tetapi wawancara tidak terstruktur seperti sebuah model yang santai dan tidak kaku¹⁹.

Setelah semua sumber ditemukan dilakukan tahap kedua yaitu baik kritik ekstern maupun intern. Kritik ini berlaku untuk kedua jenis sumber, meskipun ada sedikit perbedaan dalam waktu dan penerapan. Kritik ekstern pada sumber lisan sebenarnya sudah dimulai sejak penetapan informan. Kritik ekstern pada sumber tertulis bertujuan untuk menguji keaslian sumber. Bila telah diyakini keasliannya baru dilanjutkan dengan menguji kebenaran isinya.

Tahap ketiga adalah analisa dan interpretasi yaitu usaha untuk menghubungkan dan menganalisa fakta. Pada tahapan ini mulai dikaji sebab peristiwa terjadi dan mengaitkan sebab akibat. Tahapan penulisan adalah untuk mendeskripsikan tentang: **Perkembangan Organisasi Persatuan Istri Prajurit (Persit) Kartika Chandra Kirana payakumbuh Pada masa Orde Baru.**

¹⁹ Model ini disebut juga dengan wawancara informal atau lebih baik disebut “ berbincang- bincang secara bebas ”. meskipun pertanyaannya sudah dipersiapkan sedemikian rupa sebelumnya, tetapi jawaban yang diperoleh tidak dapat diduga atau diketahui sama sekali sebelum wawancara dilakukan. Mestika Zed, *Handout Sejarah Lisan*, (Padang : UNP, 2006),

BAB II

SEKILAS TENTANG SEJARAH PERSIT

A. Sejarah Berdirinya Persit di Indonesia

Persatuan istri prajurit kartika KCK adalah wadah organisasi istri anggota TNI AD yang didirikan di Purwakarta pada tanggal 3 April 1946 oleh Ny Ratu Aminah Hidayat, dengan tujuan ikut serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material maupun spritual berasaskan Pancasila serta membantu tugas pembinaan TNI AD sebagai komponen pembangunan bangsa, dan mewujudkan kesatuan perjuangan istri anggota TNI berdasarkan rasa senasib, dan sepenanggungan, dan seperjuangan.

Tugas pokok Persit KCK adalah membantu Kepala Staf TNI Angkatan Darat dalam pembinaan istri prajurit dan keluarganya khususnya bidang mental, fisik, kesejahteraan, dan moril sehingga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan tugas prajurit. Mendukung kebijaksanaan pemimpin TNI dengan membina dan mengarahkan perjuangan istri anggota TNI Angkatan Darat, menciptakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, rasa persatuan dan kesatuan serta kesadaran nasional²⁰.

1. Masa Pertumbuhan

Menurut buku *Untaian Bhakti Persit Kartika Chandra Kirana* 1945–1982, eksistensi organisasi istri tentara di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan dan pergerakan nasional. Pada

²⁰ www.ibupersit.com, diakses tanggal 2 Juli 2011

periode 1945–1950, yaitu periode proklamasi Kemerdekaan sampai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh dunia internasional, terjadi perang kemerdekaan melawan penjajahan kembali. Oleh karena itu, banyak organisasi dengan tujuan perempuan yang terbentuk ikut serta dalam usaha membela dan menegakkan kemerdekaan Negara, demikian pula kemunculan organisasi istri tentara, berawal dari kesadaran para istri yang suaminya bergabung dalam kelompok Badan Keamanan rakyat (BKR)²¹ untuk menghadapi penjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia.

Kesadaran para istri prajurit muncul dengan sendirinya, bukan atas anjuran atasan atau perintah organisasi tempat suaminya menggabungkan diri sebagai pejuang kemerdekaan bersenjata. Kesadaran itu bukan pula atas anjuran organisasi perempuan Indonesia yang telah ada lebih dahulu, meskipun organisasi itu berpengaruh terhadap organisasi prajurit. Persamaan nasib di kalangan istri tentara, merupakan pendorong timbulnya suatu perkumpulan

²¹ Badan Keamanan rakyat (BKR) merupakan cikal bakal terbentuknya TNI. BKR dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 terdiri dari pemuda- pemuda Pembela tanah Air (PETA) hasil pembentukan tentara Jepang, KNIL tentara pembentukan Belanda, Laskar Persatuan pemuda Indonesia (PPI), Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI), pemuda menyongsong republik Indonesia (PMRI), dan laskar Rakyat antara Lain Laskar Rakyat Jakarta, Hisbullah, Pesindo Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia(BPRI). Pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR dilebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), selanjutnya berubah menjadi Tentara Republik Indonesia(TRI). Sesuai dengan keinginan pemerintah untuk membentuk tentara reguler, maka sebagian dari lasakar rakyat yang tetap mempertahankan perjuangan partai politik tempat bernaung tidak bergabung lagi dengan TRI. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 3 Juni 1947. A. Haris Nasution, *TNI*. (Jakarta: ganaco, 1986). Hal. 28

untuk meringankan beban yang diderita suami di front pertempuran, maupun bagi para istri yang berada di di garis belakang.

Motivasi dasarnya adalah membantu memenuhi bahan pokok kehidupan suami yang berada di medan pertempuran, ikut membela negara, dan berjuang mendampingi suami sesuai dengan sifat kewanitaannya, maka kegiatan pada masa itu adalah melaksanakan dapur umum, palang merah, mengumpulkan obat-obatan, menjahit pakaian, dan membuatkan tanda pangkat pejuang. Selain itu, mereka juga berusaha mempersiapkan diri mencari daerah pengungsian apabila sewaktu- waktu daerah mereka diserang oleh pihak lawan.

Dengan didasari rasa senasib seperjuangan, di beberapa tempat istri prajurit membentuk perkumpulan yang bersifat lokal dengan nama yang berbeda-beda, namun kegiatan umumnya sama, antara lain yang berikut²²:

- a. Pada tanggal 3 April 1946 di Purwakarta terbentuk kelompok kecil istri prajurit yang kemudian dinamakan Persatuan Kaum Ibu Tentara (PKIT) atas prakarsa istri prajurit, yaitu Ibu Ratu Aminah Hidayat
- b. Di Serang, Jawa Barat, berdiri organisasi dengan nama Persatuan Istri tentara (PIT) yang diketuai oleh ibu Suhadi
- c. Di Malang Jawa timur, muncul organisasi serupa dengan penggeraknya adalah Ibu S.R Lasmidar

²² Ny. Suhardo, *50 tahun perjalanan dan pengabdian Persit Kartika Chandra Kirana* (Persit Kartika Chandra Kirana: Jakarta, 1996). Hal. 7.

d. Di daerah Sumatera, seperti Aceh, Persatuan Istri Tentara dipimpin oleh Ibu Syamaun Gaharu dan Ibu Teuku Nyak Arief.

Untuk menghadapi tantangan dan perjuangan yang semakin berat, dan mempersatukan perkumpulan istri tentara yang ada di berbagai daerah, pada tanggal 15 Agustus 1946 diadakan konferensi di Garut, Jawa Barat. Konferensi itu menyepakati bahwa nama PKIT diubah menjadi Persatuan Istri Tentara (Persit) atas saran Ibu Hamara Effendi, mendirikan koperasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan kebutuhan sehari-hari, dan membahas masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, dan terbentuknya republik Indonesia serikat, dengan demikian nama TNI berubah menjadi angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang meliputi TNI-Angkatan Darat, TNI-Angkatan Laut, dan TNI-Angkatan Udara. Dengan adanya susunan itu organisasi TNI-AD mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri RIS no. 12/MP/1950²³. Bersamaan dengan itu, ada peleburan tentara *Koningklijke Nederland Indische Leger* (KNIL) ke dalam TNI-AD maka dirasakan perlu adanya suatu wadah penyaluran kegiatan istri tentara KNIL dalam membantu tugas

²³ Y.B Mangunwijaya, *Tentara dan kaum Bersenjata* (Jakarta ; Erlangga, 1999). Hal. 6.

suami. Mereka bergabung dengan persatuan istri tentara APRIS (TNI). Hal itu didorong oleh kenyataan bahwa di dalam tubuh KNIL telah ada organisasi istri bintara dan organisasi istri perwira KNIL yang mengurus masalah keluarga mereka. Asas organisasi ialah kesatuan.

2. Organisasi Mandiri

Tahun 1950–1960 merupakan masa berbenah diri dan konsolidasi organisasi Persit yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, dengan melakukan anjingsana dan memberi bantuan kepada istri prajurit yang suaminya telah gugur.

Menurut Suryochondro, organisasi perempuan pada umumnya bertujuan untuk memupuk persaudaraan dan mengadakan persatuan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggota dan memperbaiki derajat perempuan²⁴. Dalam periode konsolidasi itu, perkumpulan istri tentara bertujuan untuk menyatukan pandangan dan kegiatannya, mengingat masa itu anggota masih terbatas dan terdapat beberapa istri bukan istri perwira yang aktif dan mampu menjalankan pimpinan organisasi. Oleh karena itu, pada tanggal 25 oktober 1950 melaksanakan kongres pertama di Semarang, atas parakarsa Ibu A.H Nasution dan dukungan Panglima Teritorium IV Kolonel Gatot Subroto. Agar kegiatan organisasi lebih sempurna dan terarah, Kongres menetapkan keputusan umum sementara organisasi Persit di tingkat pusat.

²⁴ Suryochondro, *ibid*, hal 7.

Materi yang dibahas adalah pertimbangan dasar hukum organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan program kegiatan yang meliputi bidang sosial, bidang ekonomi/ usaha, bidang pendidikan, bidang penerangan dan bidang kesehatan. Selanjutnya, kongres mengganti nama Persatuan Istri Prajurit menjadi Persaudaraan Istri Prajurit yang disingkat Persit. Selain itu, menetapkan tanggal lahir organisasi Persit pada tanggal 3 April sesuai dengan awal terbentuknya perkumpulan itu.

Dalam Anggaran Dasar Organisasi, ditetapkan asas organisasi: kekeluargaan, membantu moral dan material para anggota, meningkatkan keterampilan. Selain itu, merumuskan pula simbol dan lambang organisasi Persit yakni berupa gambar bunga teratai, berjabatan tangan, dan obor atau nyala api tiga buah. Lambang itu diletakkan pada dasar warna hijau dengan simbol dan tulisan berwarna kuning. Artinya bunga terus melambangkan keperempuanan, berjabatan tangan melambangkan persaudaraan, dan tiga pelita melambangkan penyuluhan²⁵.

Struktur organisasi pada masa itu masih dalam bentuk perwakilan dari perkumpulan persatuan istri tentara belum sepenuhnya dikaitkan dengan organisasi TNI. Oleh karena itu, pimpinan organisasi masih berdasarkan pemilihan, kebanyakan menunjukkan perwakilan yang terpilih untuk menjadi pengurus di

²⁵ Ny. Ering Djoko Subrandio, *Melangkah Bersama Kartika Chandra Kirana* (Persit Kartika Chandra Kirana: Jakarta, 1996), hal. 11

tingkat wilayah adalah istri para pemimpin TNI-AD yang berada di wilayah tugas mereka.

Seiring dengan bertambahnya jumlah prajurit yang berkeluarga, kebutuhan perumahan bagi anggota tentara menjadi perhatian Persit. Oleh karena itu, Persit mengeluarkan resolusi yang mendesak pemerintahan untuk mengadakan perbaikan asrama prajurit yang dewasa itu kurang memadai, dan tidak memenuhi syarat kesehatan. Resolusi itu tetap menjadi salah satu tuntutan yang diperjuangkan pada saat penyelenggaraan kongres III pada tanggal 17–20 Desember 1953 di Denpasar, Kongres IV tanggal 19–25 Juli 1955 di Yogyakarta, dan kongres V tanggal 23–28 Januari 1958 di Malang. Selain itu, melalui Kementerian Pertahanan, Persit mendesak pemerintah untuk menyetarakan pegawai negeri sipil dan polisi mengenai gaji anggota tentara, tunjangan uang duka jika gugur dalam tugas operasi, jaminan sosial para keluarga yang ditinggal tugas, dan pembayaran pensiun janda.

Untuk menyatukan pembinaan, kongres V menetapkan untuk melakukan penyempurnaan AD-ART sesuai dengan kondisi TNI-AD, khususnya mengenai fungsi dan tugas utama persit: membantu meringankan beban istri prajurit, menyempurnakan struktur organisasi dan menyelenggarakan Kongres dua tahun sekali. Selain itu, diterbitkan majalah Persit yang berjudul Kencana sebagai komunikasi antara pimpinan/ pengurus dan anggota Persit.

Pada tanggal 19 September 1954 salah satu kegiatan penting yang dilakukan di luar organisasi Persit adalah menyokong Pengurus Besar Perwari dalam mewujudkan Undang- Undang Perkawinan dan mendukung perjuangan Perwari mengenai hak dan kedudukan perempuan. Hal itu merupakan rasa keprihatinan Persit terhadap merajalelanya gejala pemaduan yang sewenang- wenang. Maka kongres V (1958) mengeluarkan resolusi yang memperkuat resolusi Kowani (Dalam Kongres Kowani IV, di Surabaya 27–30 November 1957), yaitu mendesak parlemen dan pemerintah untuk secepatnya mewujudkan undang- undang perkawinan yang adil, dengan melibatkan organisasi perempuan dan penyusunannya. Selain itu, dalam resolusi mengenai perbaikan nasib perempuan, Persit menuntut agar janda cerai mendapat sepertiga gaji bersih suami. Namun, Persit tidak ikut menandatangani suatu pernyataan menentang perkawinan Soekarno.

Pada periode 1950–1959, yaitu setelah kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh dunia internasional, perhatian masyarakat lebih banyak diarahkan pada pemilihan umum (pemilu) yang diadakan pada tahun 1955, maka perempuan melalui organisasi perempuannya merupakan suatu kelompok yang menentukan keberhasilan pemilu. Akan tetapi, pada saat Pemilu 1955 Persit tidak ikut mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia ataupun di perwakilan tingkat daerah, tetap menggunakan hak

pilihnya. Hal itu disebabkan kondisi keuangan organisasi yang terbatas, dan mengacu pada tujuan organisasi untuk membantu dan mendukung moril TNI-AD sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan.

Menurut Suryochondro, “suatu gejala yang menarik ialah bahwa meskipun perkumpulan istri ini merupakan kelompok pendamping, akan tetapi mereka masih cukup mandiri”²⁶.Kemandirian ini terlihat juga pada organisasi Persit namun mengarah ke organisasi yang eksklusif, artinya kegiatan hanya dilakukan di dalam organisasi itu. Hal itu tampak pada resolusi yang muncul pada setiap Kongres.

- a. Kongres IV, di Yogyakarta pada tanggal 19-25 Juli 1955 menghasilkan ketentuan bahwa pemimpin, mulai tingkat pusat, cabang sampai ranting, tidak dibenarkan menjabat ketua organisasi lain.
- b. Kongres V, di Malang pada tanggal 23-28 januari dibahas pemimpin organisasi yang sanggup melaksanakan program agar Persit benar- benar menjadi tempat bernaung dan jembatan untuk perbaikan nasib serta pembelaan hak-hak istri dan keluarga prajurit.
- c. Kongres VI, di magelang pada tanggal 1–14 januari 1961, menetapkan struktur organisasi, merupakan program kerja dan

²⁶ op.cit, hal. 18.

menyusun buku pedoman dan petunjuk praktis administrasi umum.

3. Organisasi Semi Dinas

Sejak pertumbuhan organisasi dari tahun 1946 hingga 1963, organisasi persit masih berada di luar organisasi TNI-AD. Artinya, organisasi persit dibina secara langsung oleh institusi angkatan darat sehingga para anggotanya merasa bahwa pembinaan dirasakan belum mantap.

Mengingat perkembangan organisasi dalam masa ini sangat dipengaruhi situasi politik negara setelah dikeluarkan “Dekrit Presiden bulan Juni 1959”, pada periode 1955–1965, terdapat dua aliran politik untuk kekuasaan, yaitu golongan komunis dan bukan komunis. Selain itu muncul pertentangan politik luar negeri yang berkaitan dengan perjuangan merebut Irian Jaya dari penjajahan Belanda dan konfrontasi dengan Malaysia, yang mempengaruhi pergerakan organisasi perempuan di Indonesia. Akibatnya, tujuan organisasi perempuan mengenai kependudukan dan perjuangan hak perempuan menjadi berkurang, perjuangan lebih mengutamakan kepentingan negara.

Untuk membendung kekuasaan golongan komunis maka TNI bekerjasama dengan Golongan Karya untuk membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (sekber Golkar). Maka di bawah koordinasi Kowani, organisasi perempuan bergabung

membentuk satuan tugas (Satgas) sukarelawati (suswati)²⁷, dalam rangka perjuangan Dwikora mengganyang malaysia.

Salah satu pengarahannya mantan pemimpin TNI-AD yaitu dalam Kongres VII berlangsung di Jakarta pada tanggal 22-25 april 1963, mantan Menteri/panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal A. Yani, antara lain ialah “mengingat lahirnya persit karena adanya TNI- Angkatan darat, maka kegiatan persit tidak dapat lain kecuali harus sejiwa dengan dan bersumber kepada pedoman- pedoman kebijaksanaan Pemimpin TNI-Angkatan Darat. Oleh karena itu, Persit agar menghindari ketidakselarasan tindakan, apalagi perbedaan dalam masing- masing kebijaksanaan.” Hal itu dilakukan, karena TNI-AD mensinyalir sudah ada usaha- usaha dari berbagai pihak untuk mempengaruhi organisasi Persit.

Dalam kongres VII membuat ketentuan pokok bagi anggota Persit seluruh Indonesia diantaranya ialah:

- a. Persit sebagai organisasi berkewajiban memberi penghormatan sepenuhnya kepada Presiden dengan kedudukannya sebagai Kepala Negara;
- b. Sebagai istri anggota alat negara, anggota persit harus melaksanakan kewajibannya dimanapun berada dan dalam segala situasi;
- c. Tidak menyalahi norma- norma pergaulan yang sopan;
- d. Agar waspada terhadap segala sesuatu dan jangan sampai terpengaruh provokasi

dengan adanya sinyalemen di atas, ada kekhawatiran di dalam TNI- AD bahwa paham komunis dan kekuatan lainnya akan

²⁷ KOWANI, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1987), hal. 152.

mempengaruhi organisasi Persit, dan akhirnya berpengaruh pula pada anggota prajurit dan keluarganya. Oleh karena itu, Persit perlu menyelenggarakan Kongres VIII walaupun belum waktunya (belum genap dua tahun), atau Kongres “Darurat” pada tanggal 9–12 Desember 1964 di Jakarta.

Tujuan kongres ini *pertama*, menyelamatkan organisasi Persit dari paham komunis yang bertentangan dengan sumpah dan kewajiban prajurit. *Kedua*, membina anggota Persit dalam kehidupan berorganisasi dan keluarga. Pembinaan itu merupakan tanggung jawab TNI–AD. Selanjutnya, langkah yang diambil adalah menetapkan pemimpin yang dipegang oleh istri pemimpin TNI–AD. Maka jabatan pengurus Persit menjadi fungsional. Ketentuan itu muncul atas pengarahan mantan Men/Pangad (jenderal A. Yani) mengingat pada masa itu belum semua istri prajurit menjadi anggota Persit. banyak istri prajurit yang aktif di luar organisasi persit, misalnya pada organisasi Wanita Marhaen, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Muslimat NU dan wanita Katolik.

Hasil Kongres VIII (Darurat) tahun 1964 adalah penyempurnaan AD–ART Persit, khususnya perihal jabatan pemimpin yang dipegang oleh istri pemimpin TNI–AD. Ketentuan itu termuat pada Bab II, pasal 15. Sejak itu pemimpin organisasi ditunjuk dan harus disahkan oleh pemimpin TNI–AD.

Hal itu berarti pemilihan ketua umum atau daerah tidak dilakukan dengan cara demokratis. Ketentuan seperti itu berlaku hingga sekarang dan telah mengalami penyempurnaan. Contohnya terdapat dalam AD dan ART hasil Kongres IX tahun 1967 yang berbunyi sebagai berikut “Isteri Menteri Panglima Angkatan darat/Panglima daerah Militer/komandan Militer yang bersangkutan sedapat–dapatnya menjadi ketua/anggota pimpinan pusat/daerah/cabang/ranting/anak ranting, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Men/pangad No. Kep-766/6/1967 tanggal 29 Juni 1967 tentang kedudukan Istri Pangad adalah jenderal Panggabean sehingga Ibu Panggabean menjadi pemimpin PKCK. Maka, sebagai kelanjutannya jabatan ketua dan wakil ketua setiap pengurus dijabat secara fungsional.

Penetapan pemimpin menjadi fungsional, artinya tidak demokratis lagi. Keanggotaannya tidak lagi sukarela melainkan otomatis; semua istri prajurit harus menjadi anggota tanpa mengajukan permintaan terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa anggota mempunyai hak dan kewajiban dalam organisasi, harus tunduk pada peraturan yang berlaku dan aktif dalam setiap kegiatan.

Pemimpin TNI–AD juga merasa perlu mengambil alih pelatihan suswati khususnya bagi anggota Persit, namun di kemudian hari sesuai keputusan Konferensi Persit tanggal 2–4

September 1996, latihan kemiliteran bagi anggota dianggap tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Oleh karena itu, kelompok kerja IV konferensi mengusulkan agar mengurangi latihan kemiliteran dan menggantikannya dengan kegiatan yang menitikberatkan kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang sesuai dengan fungsi perempuan, keibuan, dan istri prajurit.

Usulan itu diterima dengan pertimbangan menyelamatkan istri prajurit dari paham komunis. Maka, Men/Pangad (Jenderal Soeharto) mengeluarkan keputusan Nomor Kep-108/10/1966, untuk mencabut latihan susilawati.

Dengan adanya penetapan organisasi Persit menjadi organisasi semi dinas hingga kini masih berlaku. Kegiatan organisasi banyak didukung oleh instansi baik materil dan moril. Perkembangan selanjutnya, yaitu merubah istilah rapat kerja menjadi musyawarah pusat (Mupus) yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali sejak 1978. Semenjak mupus I tahun 1978 sampai dengan mupus VII tahun 1999, hasil musyawarah lebih banyak diarahkan pada penyempurnaan AD ART sesuai dengan struktur organisasi TNI-AD.

B. Lahirnya Persit Kartika Chandra Kirana Payakumbuh

Pada periode 1947, kegiatan persatuan istri tentara meluas ke luar Pulau Jawa sehingga bermunculan banyak persatuan istri prajurit.

Misalnya di Sumatra, persatuan istri tentara terdapat di Aceh, Padang, Langkat, dan tanah Karo.

Sejarah berdirinya Persit Kartika Chandra Kirana di Payakumbuh ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Kodim 0306 Payakumbuh. Diawali dengan pembentukan kesatuan atau batalyon baru yang didasari oleh adanya pemberontakan oleh kelompok-kelompok pemberontak. Maka sesuai dengan perintah komando atas terbentuklah Batalyon baru di wilayah Sumatera bagian Barat dalam menjaga keamanan dan mempertahankan daerah dari serangan pemberontak. Adapun yang melatar belakangi pembentukan yaitu dengan dikeluarkannya surat perintah Komando operasi 17 Agustus nomor : SP-262/7/158 tanggal 1 Juli 1958. Setelah kompi-kompi dari Batalyon Infanteri terbentuk maka Komando Territorial disusun sebagai berikut²⁸:

Korem 032/Wira Braja Padang :

1. Yonif 131/Braja Sakti Payakumbuh, Sumbar
2. Yonif 133/Yudha Sakti Padang Panjang, Sumbar
3. Den Zipur-2
 - a. Kodim 0304/Agam
 - b. Kodim 0305/Pasaman
 - c. Kodim 0306/Payakumbuh
 - d. Kodim 0307/Tanah Datar

²⁸ Arsip Kodim 0306 Payakumbuh

- e. Kodim 0308/Pariaman
- f. Kodim 0309/Solok
- g. Kodim 0310/Sawahlunto Sijunjung
- h. Kodim 0311/Painan
- i. Kodim 0312/Padang

Kodim 0306 Payakumbuh berdiri pada tanggal berdiri pada tanggal 10 februari 1959, maka secara otomatis Persit di Payakumbuh pun berdiri pada saat itu. Pada tahun 1959, perkumpulan istri tentara di Payakumbuh bertujuan untuk menyatukan pandangan dan kegiatannya, mengingat masa itu anggota masih terbatas dan terdapat beberapa istri bukan istri perwira yang aktif dan mampu menjalankan pimpinan organisasi. Jumlah anggota Persit pada masa itu belum besar karena pada tahun 1950–1959 baru sekitar sepuluh persen anggota prajurit TNI–AD yang berkeluarga. Sesudah pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia, banyak prajurit yang mengajukan permohonan nikah, maka anggota organisasi Persitpun bertambah ²⁹.

Seiring dengan bertambahnya jumlah prajurit yang berkeluarga, maka Persit di payakumbuh yang berpusat di Kodim (Komando distrik militer) 0306 Cabang 60 (Enam Puluh) Koorcabrem 032 PD I/Bukit Barisan Payakumbuh semakin berkembang, hingga terdiri dari 7 ranting :

1. Persit Koramil 01 Ranting I yang terletak di kota Payakumbuh

²⁹ Wawancara dengan Emi, mantan anggota Persit Kartika Chandra Kirana tahun 1996, tanggal 7 Juli 2011.

2. Persit Koramil 02 Ranting VIII yang terletak di Kapur IX
3. Persit Koramil 03 Ranting IV yang terletak di Limbanang
4. Persit Koramil 04 Ranting V yang terletak di kecamatan Luhak
5. Persit Koramil 05 Ranting VI yang terletak di Harau
6. Persit Koramil 06 Ranting VIII yang terletak di Guguk
7. Persit Koramil 07 Ranting VIII yang terletak di Akabiluru

Pada periode 1966–1976, yaitu pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru terjadi suatu perkembangan yang penting di dalam Persit Cabang 60 ini, di mana organisasi perempuan di kalangan ABRI ditetapkan sebagai semi dinas³⁰. Pada tanggal 6 Maret 1972, Persit bergabung menjadi Dharma Pertiwi yang beranggotakan Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, Pia Ardhya Garini dan IKKT Pragati Wira Anggini, dengan demikian kedudukan Persit Kartika Chandra Kirana merupakan organisasi kemasyarakatan yang berinduk pada organisasi kemasyarakatan Dharma Pertiwi.

1. Struktur organisasi

Awal berdiri Persit Payakumbuh, yaitu pada tanggal 10 februari 1959, keanggotaannya sukarela, pimpinan dipilih oleh anggota, dan para anggota organisasi berjuang untuk hal-hal yang

³⁰ Tujuan organisasi berubah yang semula bertujuan semata-mata mengusahakan kesejahteraan anggota persit menjadi diarahkan untuk semu prajurit TNI sehingga batas privasi antara kehidupan keluarga dan urusan dinas menjadi kabur. www.progin.net. *Sepintas Gerakan Perempuan Indonesia dalam perkembangan sejarah*. Diakses tanggal 13 Juli 2011

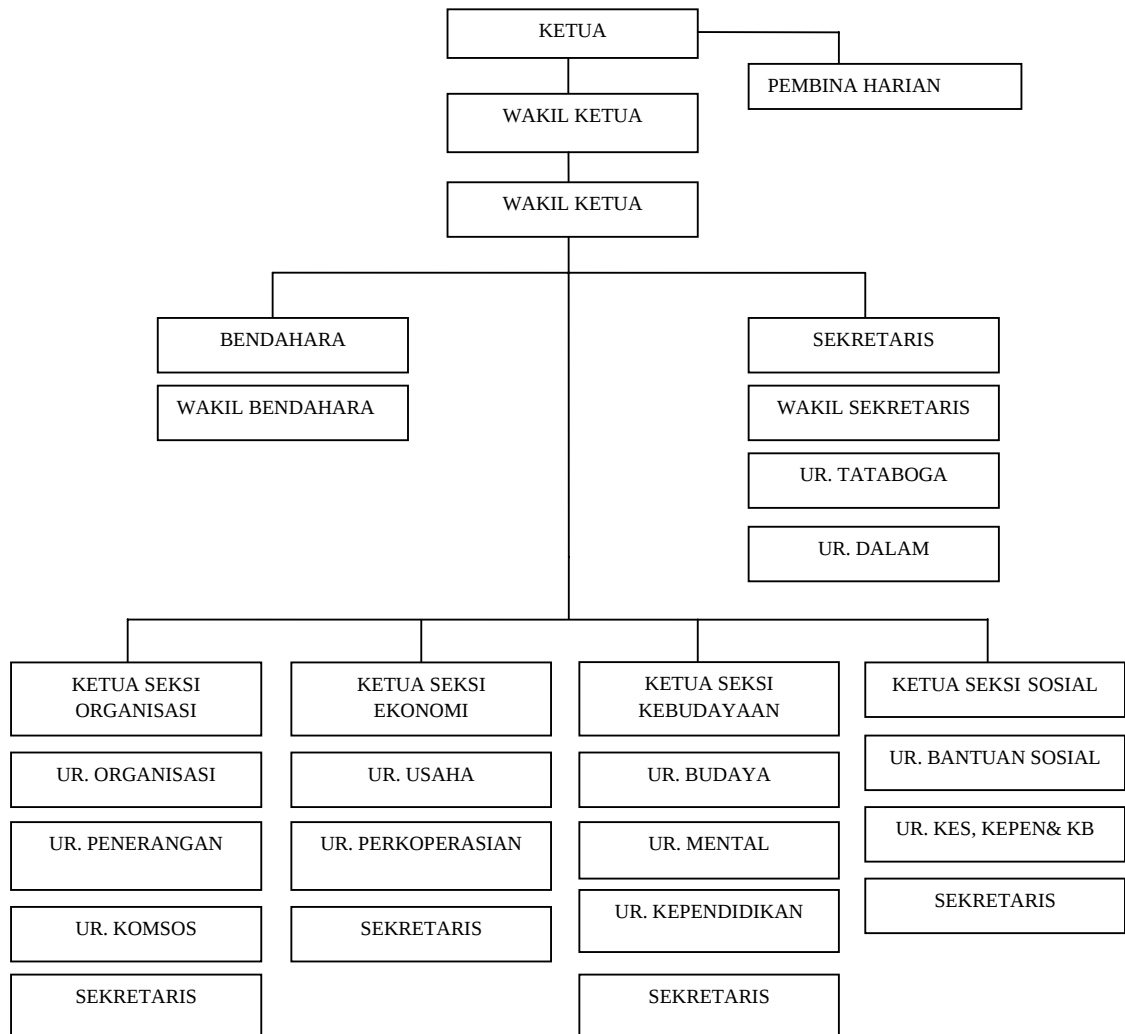
dirasakan sebagai kepentingan mereka³¹. Pada tahun 1950–1965 Struktur organisasi Persit masih dalam bentuk perwakilan dari perkumpulan persatuan istri tentara belum sepenuhnya dikaitkan dengan organisasi TNI. Oleh karena itu, pimpinan organisasi masih berdasarkan pemilihan, kebanyakan menunjukkan perwakilan yang terpilih untuk menjadi pengurus di tingkat wilayah adalah istri para pemimpin TNI–AD yang berada di wilayah tugas mereka.

Struktur ini diubah oleh pemerintah Orde Baru. Pimpinan tidak lagi berdasar pemilihan, tetapi organisasi harus mengikuti pola hirarki yang sama dengan hirarki pemerintahan, dengan demikian, pemimpin di dalam organisasi Persit KCK terdiri atas Ketua yang dijabat oleh istri pejabat tertinggi TNI AD di lingkungannya dan Wakil Ketua yang dijabat oleh istri pejabat tinggi TNI AD di lingkungannya. Jika suami pindah atau naik pangkat maka istri pun mengikutinya.

Sering terjadinya alih tugas baik pada ketua maupun anggota pengurus lainnya menyebabkan sering terjadi ketidaksinambungan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

³¹ Wawancara dengan Neda, mantan anggota Persit Kartika Chandra Kirana tahun 1996, tanggal 10 Juli 2011

Susunan Kepengurusan Persit KCK Payakumbuh



(Sumber: Arsip Persit Payakumbuh)

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Ketua dibantu oleh pembantu pemimpin dan anggota pengurus lainnya, yang terdiri dari ketua seksi organisasi yang membawahi kegiatan dibidang organisasi, personalia dan penerangan: ketua seksi ekonomi yang

membawahi kegiatan di bidang usaha dan perkoperasian; ketua seksi kebudayaan yang membawahi kegiatan di bidang budaya, pembinaan mental dan pendidikan; ketua seksi sosial yang membawahi kegiatan di bidang sosial dan kesehatan, sekretaris dan bendahara. Para pembantu pemimpin dan anggota pengurus lainnya ditetapkan oleh pemimpin dari calon-calon yang diusulkan serta disahkan dalam rapat

Anggota Persit KCK terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan³², anggota biasa Persit adalah istri prajurit organik TNI AD yang suaminya masih dinas aktif baik di organisasi TNI AD atau di luar lingkungan TNI AD, suaminya memasuki masa pensiun dan diangkat sebagai anggota cadangan dalam dinas aktif dan istri Purnawirawan TNI AD yang ditugasi atas nama Persit dengan persetujuan pembina. Anggota luar biasa Persit adalah istri Purnawirawan dan warakawuri TNI AD yang tetap menjadi anggota selama 2 tahun terhitung mulai suami berhenti dinas aktif atau meninggal dunia, istri PNS TNI AD, dan istri militer Tituler TNI AD.

Anggota biasa persit berhak untuk mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat serta memilih pengurus dan dipilih sebagai pengurus, sementara anggota luar biasa berhak

³² ADART Persit KCK tahun 1990

mengemukakan pendapat dan mendapat perlakuan yang sama dengan anggota biasa dalam bidang kesejahteraan.

Anggota biasa mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik organisasi, mentaati AD ART dan peraturan organisasi Persit KCK, membayar iuran, mengikuti rapat, memiliki KPI dan KTA³³. Sedangkan anggota luar biasa mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik organisasi, mentaati AD ART dan semua peraturan organisasi Persit KCK³⁴.

2. Kegiatan Persit Payakumbuh

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka kegiatan rutin yang dilaksanakan di dalam organisasi persit payakumbuh antara lain:

a. Serah terima jabatan ketua dan wakil ketua

Pada saat akan dilaksanakan serah terima jabatan Ketua dan wakil ketua Persit KCK, pengurus membentuk panitia serah terima dan mengajukan permohonan Skep kepada pengurus satu tingkat atas. Setelah selesai penandatanganan berita acara, dilaksanakan acara tambahan yaitu pemberian cinderamata

b. Serah terima pembantu pemimpin dan anggota pengurus

³³ Salah satu ciri istri prajurit adalah pemilikan kartu tanda anggota (KTA) dan kartu penunjuk istri (KPI). Dalam kedua kartu tersebut terempel foto suami dan istri secara berdampingan, keduanya memakai pakaian seragam, suami memakai baju dinas dan istri mengenakan seragam organisasi persit KCK. Wawancara dengan Titik, anggota persit KCK Payakumbuh, tanggal 11 Juli 2011

³⁴ ADART Persit KCK tahun 1994

Prosesnya sama dengan serah terima jabatan Ketua dan wakil Ketua

c. Peringatan HUT PERSIT

1) kegiatan wajib

a) Upacara ziarah

Ziarah ke taman makam pahlawan dilaksanakan secara serentak oleh semua tingkat kepengurusan

b) Upacara puncak peringatan hari ulang tahun

Dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi masing- masing dengan persetujuan pembina tingkat kepengurusan yang bersangkutan dan tidak lebih dari tanggal 10 April

2) kegiatan tambahan

a) Kegiatan sosial (anjangsana, donor darah, silaturahmi)

b) Kegiatan lain menyesuaikan dengan tema (ceramah, lomba keterampilan, olahraga)

d. Kunjungan Kerja

Ketua melakukan pemeriksaan buku laporan keuangan masing- masing seksi dan memeriksa kebersihan kantor Persit.

e. Melaksanakan rapat pengurus lengkap

f. Pertemuan anggota

Melaksanakan arisan, pengarahan dari Ketua dan pengenalan anggota baru. Pertemuan anggota dilakukan 1 kali dalam sebulan.

- g. Kegiatan-kegiatan lain yang hampir dilakukan setiap minggu seperti latihan bola voly, senam pagi, yasinan, dan lain-lain.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui bahwa organisasi Persit tidak menyuarkan aspirasi perempuan, karena program kegiatan hanya terbatas pada lingkungan sendiri, dimulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah sehingga ada anggapan tidak menyentuh perempuan yang berada dikelas bawah dan tidak sensitif terhadap masalah- masalah perempuan yang berada di kelas bawah dan tidak sensitif terhadap masalah- masalah perempuan. Kegiatan Persit yang monoton kadang membuat para anggota mengeluh, seperti yang dituturkan oleh ibu Leni berikut ini³⁵:

“Dalam satu minggu terdapat beberapa kegiatan yg harus diikuti oleh ibu-ibu persit. Ada olahraga, yasinan, dan senam pagi. Kegiatan-kegiatan itu selalu dilaksanakan secara terus-menerus selama tidak ada aturan libur, terutama yg terakhir kadang suka tidak terjadwal(bagi yg suka). Kalau ada seorang ibu yang tidak hadir pun harus minta izin sama yg tertua. Sudah seperti bapak- bapaknya nya saja, pakai perizinan segala. Tapi ya gimana lagi, memang sudah prosedurnya begitu hidup di lingkungan militer. Ya mau nggak mau kita harus ikutin aturan disana. Tetapi terkadang terpikir nggak sih ada rasa bosan dan jenuh dengan kegiatan yg itu-itu saja”.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu isah³⁶:

“dalam mengikuti kegiatan ,ada yg suka ada yg tidak. Ada yg senang aktif ada yg malas. ada juga yg terpaksa ikut karena dulu pada saat pengajuan dia sudah menyetujui pernyataan bahwa setiap anggota persit diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan yg ada dalam persit. Bagi anggota persit lama, pasti juga

³⁵ Wawancara dengan Leni , Anggota Persit Kartika Chandra Kirana, tanggal 10 Juli 2011

³⁶ Wawancara dengan Isah, Anggota Kartika Chandra Kirana, tanggal 10 Juli 2011

merasa bosan. Sewaktu saya baru masuk asrama sempat terdengar selentingan kabar kalau ada ibu Persit yg jarang mengikuti kegiatan akan dipanggil dan diberi pengarahan, untuk itu saya setuju, tapi saya jadi heran setelah mendengar kabar jika ibu persit tidak mengikuti kegiatan maka suaminya yang akan dipanggil. kenapa mesti begitu apa lagi kalau itu dikait-kaitkan dengan karier suami saya jadi tidak habis pikir.....”

Dengan sistem patriaki yang kental, melalui organisasi Persit KCK, militer/ laki-laki mengontrol kegiatan istrinya. Perempuan harus dikuasai oleh laki-laki dan merupakan bagian dari harta milik lelaki. Oleh karena itu, kaum perempuan harus dijaga dan ditempatkan pada tempat yang aman. Demikian pula laki-laki membuat semua keputusan penting dalam kehidupan keluarga militer. Dalam sistem patriaki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Dengan demikian, sistem patriaki mengontrol bidang kehidupan dan kegiatan perempuan, baik di dalam ataupun di luar rumah, reproduksi perempuan, seksualitas perempuan, dan gerak perempuan.

BAB IV

KESIMPULAN

Perkembangan Organisasi Persit Kartika Chandra Kirana payakumbuh sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Penanaman konsep hierarki dan patriarki yang kuat sejak pemerintahan Orde Baru menyebabkan organisasi Persit bertahan dalam bidang yang bersifat domestik. Organisasi Persit Payakumbuh belum mampu menentukan sikapnya dalam memahami persoalan perempuan karena setiap kebijakan dan program kegiatannya selalu bergantung pada kebijakan institusi TNI-AD yang mengacu pada tujuan utama, yaitu membantu pimpinan TNI-AD dan secara struktural berada dalam pembinaan TNI-AD.

Akibat dari penunjukan pimpinan organisasi yang disesuaikan dengan struktur organisasi militer antara lain organisasi Persit KCK cenderung untuk:

- a. Secara tidak sadar, anggota mau tidak mau, puas tidak puas terpaksa menerima ketua sebagai akibat sistem penunjukan langsung dari pimpinan militer
- b. Terpaksa patuh untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan, terutama karena mengkhawatirkan nasib jabatan suami di kantor
- c. Memiliki citra bahwa tugas istri adalah mendukung tugas suami
- d. Sebagai anggota tidak memiliki kontrol kekuasaan atas jalannya organisasi
- e. Opini dan pandangan dari anggota tidak berani disuarakan karena mengkhawatirkan posisi suami

Program kegiatan Persit KCK hanya terbatas pada lingkungan sendiri, sehingga tidak menyentuh perempuan yang berada di kelas bawah dan tidak sensitif terhadap masalah- masalah perempuan (bias gender).

Demikian halnya struktur organisasi yang bersifat hierarkis cenderung menguatkan budaya patriaki yang bernuansa feodal. Sejak terbentuknya, secara struktural tampak bahwa organisasi istri belum mandiri sepenuhnya dan masih banyak “dibantu” oleh organisasi TNI-AD. Pada akhirnya, organisasi PKCK mengalami ketergantungan. Struktur organisasi istri PKCK yang disusun secara hierarkis sesuai dengan struktur organisasi TNI-AD mengakibatkan organisasi ini menjadi subordinat terhadap institusi militer. Padahal apabila organisasi ini ditingkatkan sebagai organisasi yang mandiri dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia yang berkualitas, organisasi itu dapat benar-benar tujuannya.

Dapat disimpulkan bahwa pertama perempuan tetap diberikan kedudukan dalam masyarakat namun masih dalam lingkup domestik, sehingga peranan perempuan tetap diarahkan pada tugas domestik. Kedua perempuan ditempatkan sebagai komponen dalam mengukur keberhasilan tugas suami, sehingga kepatuhan perempuan sangat dituntut demi menunjang karier dan kedudukan suami. Ketiga, dalam konteks tertentu, konsekuensi dari penempatan perempuan dalam struktur institusi militer, menyebabkan terjadinya pembatasan ruang gerak perempuan untuk mengaktualisasi dan mengembangkan diri semaksimal mungkin. Dengan demikian negara dan TNI-AD memperoleh keuntungan ganda yaitu memperoleh dukungan moral berupa kepatuhan dari para istri, dan secara materiil memperoleh pelayanan istri yang tidak menuntut imbalan (gratis).

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip dan Dokumen

Arsip KODIM 0306 tentang susunan komando tetitorial

Persit Kartika Chandra Kirana. 1996. *Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Jakarta

_____.1983. *Untaian Bakti Persit Kartika Chandra Kirana 1945-1982*

_____.1996. *Himpunan hasil Musyawarah Pusat VII Persit Kartika Chandra Kirana*

Djoko Subandrio, Ering, 1999. *Melangkah bersama Kartika Chandra Kirana*.

Suhardo, 1999. *50 tahun Perjalanan dan Pengabdian Persit*

B. Buku

Budiman, Arief, 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Gunawan, Riyadi, 1993. *Gerakan Perempuan Dulu, sekarang dan sumbangannya kepada transformasi Bangsa*. Yogyakarta: Tiara Wacana

_____, 1993. *Dimensi- dimensi Perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam perspektif sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Handoko, 2008. *Perilaku Organisasi Buku 2*, Jakarta: Salemba Empat

Iswandi, 1998. *Bisnis Militer Orde Baru*, Bandung: Rosdakarya

Kowani, 1986. *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Mangunwijaya, Y.B, 1999. *Tentara dan kaum Bersenjata*. Jakarta: Erlangga